

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD;
2. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator nilai PAD;
3. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan; dan
4. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan publik.

Hasil capaian empat sasaran tersebut pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai EKPPD ditargetkan masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), tercapai 3,4581 atau masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) dengan tingkat capaian indikator 100%;
2. Indikator nilai PAD ditargetkan mencapai Rp376.000.000.000, tercapai Rp483.881.606.611,65 (data per 30 November 2020-*unaudited*) dengan tingkat capaian indikator 128,69%;
3. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan ditargetkan mencapai angka indeks 93,4 tercapai 90,7 (data per 29 Desember 2020) dengan tingkat capaian indikator 97,11%; dan
4. Indikator indeks pelayanan publik ditargetkan mencapai angka indeks 80,5 tercapai 80,45 dengan tingkat capaian indikator 99,94%.

Realisasi anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp10.692.351.067 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp11.298.051.883 sehingga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp605.700.816 atau 5,36%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Isu Strategis	11
1.4 Keadaan Pegawai	12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	16
1.6 Keuangan	20
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	22
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	27
2.2 Perjanjian Kinerja.....	29
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020	31
2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah	35
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020	38

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

3.2	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	39
3.2.1	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatkan...	39
3.2.2	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan	45
3.2.3	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan.....	47
3.2.4	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan.....	51
3.3	Realisasi Anggaran	57
3.4	Inovasi.....	61
BAB IV	PENUTUP.....	66

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah.....	12
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon	13
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi	14
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah	16
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.....	22
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah.....	24
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan	28
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2020.....	29
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2020	30
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020.....	32
Tabel 2.7 Target Belanja Sekretariat Daerah APBD Perubahan Tahun 2020.....	35
Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020 Per Program dan Kegiatan	35
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	37
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	38
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	39
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2020.....	40
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya.....	40
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD	41
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Secara Nasional .	42
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Nilai PAD Tahun 2020.....	45
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai PAD Dengan Tahun Sebelumnya	45

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Nilai PAD	46
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020	48
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya	48
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan	48
Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020	51
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020	52
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya....	52
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelayanan Publik	53
Tabel 3.17 Realisasi Program (<i>Outcome</i>) Sekretariat Daerah Tahun 2020	54
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020	57
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020	58
Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020	60
Tabel 3.21 Analisis Efisiensi	60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	4
Gambar 3.1 Tampilan Masuk Aplikasi KILAS Pada Halaman JSS	62
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Utama Aplikasi KILAS	63
Gambar 3.3 Tampilan Masuk Layanan Konsultasi Hukum Pada Halaman JSS.....	64
Gambar 3.4 Tampilan Halaman Utama Layanan Konsultasi Hukum Mbak Ratu	65

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (LKIP Setda) Tahun 2020. Isi LKIP Setda tahun 2020 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2020 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2020.

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pasal 22.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2020 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang

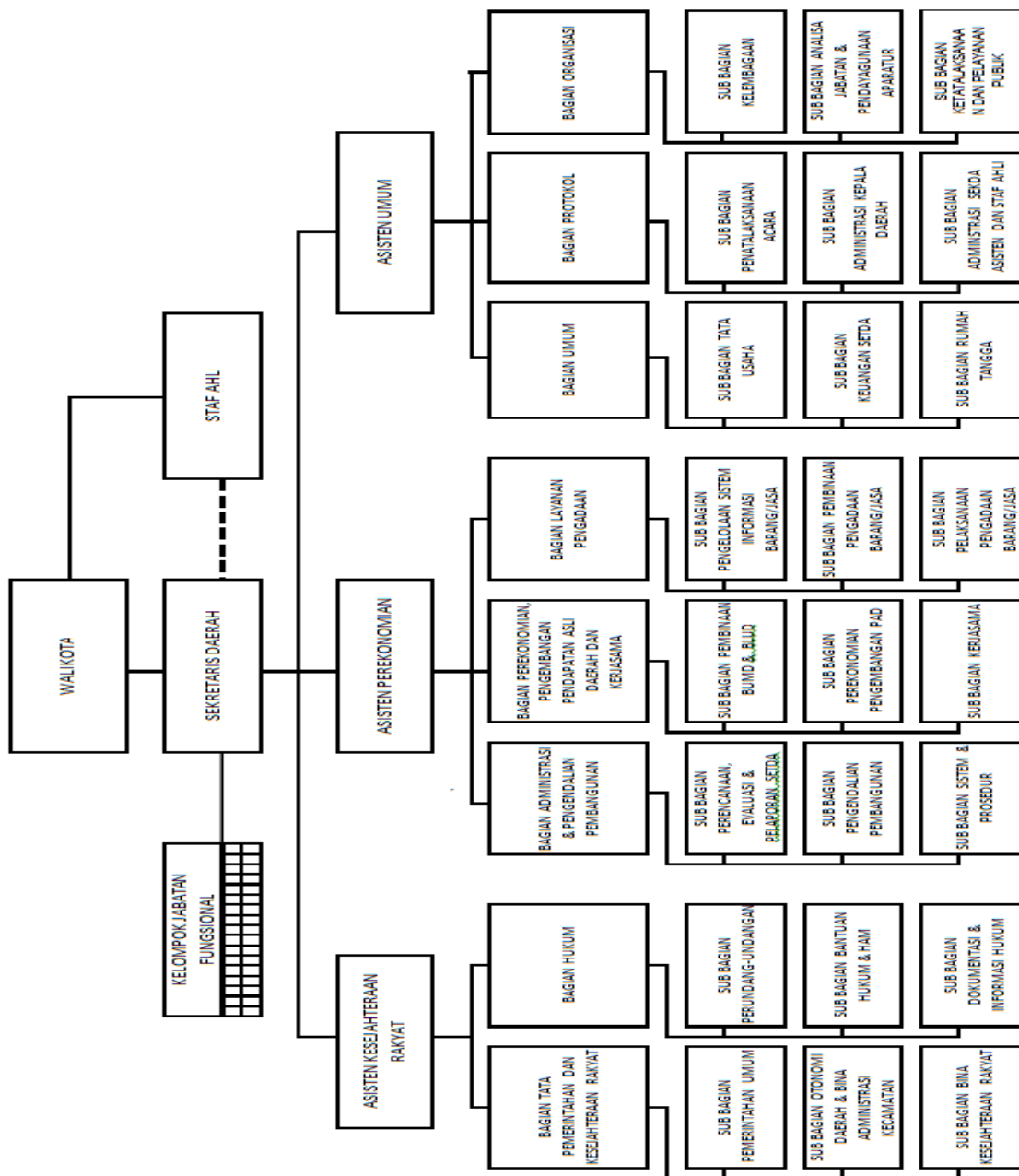
1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Bagian Hukum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur.

- 2) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
- 3) Bagian Layanan Pengadaan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Asisten Umum, yang membawahi:
 - 1) Bagian Protokol, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
 - 2) Bagian Umum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Bagian Organisasi, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Kelembagaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016

1.2 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;

- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan.

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama.

Fungsi Bagian P3ADK:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:

Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

6. Tugas pokok Bagian Umum:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang tata usaha, bidang keuangan sekretariat daerah, serta bidang rumah tangga.

Fungsi Bagian Umum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.

Fungsi Bagian Protokol:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang sudah dilakukan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis sinergitas ketugasan kampung dengan kelembagaan masyarakat lainnya sebagaimana sudah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
 - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 164 orang (data per 2020), dengan rincian 137 orang PNS dan 27 orang tenaga bantuan. Jumlah ini turun dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 171 orang. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 316 orang, dengan demikian baru terpenuhi 51,9%. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 orang
Asisten Perekonomian	1 orang
Asisten Umum	1 orang
Staf Ahli	3 orang
Kepala Bagian	6 orang
Kepala Sub Bagian	23 orang
Staf	101 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	27 orang
TOTAL	164 orang

Tabel 1.2

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	18 orang
III	107 orang
II	12 orang
I	- orang
TOTAL	137 orang

Tabel 1.3

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	7 orang
III	6 orang
IV	23 orang
Staf	101orang
TOTAL	137 orang

Tabel 1.4

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	29 orang	21,17%
S1	71 orang	51,82%
D3	8 orang	5,84%
D2	-	-
SMA/SMK	27 orang	19,71%
SMP	2orang	1,46%
SD	-	-
TOTAL	137 orang	100%

Tabel 1.5

Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	-	-
S1	12 orang	44,44%
D3	6 orang	22,22%
D2	1 orang	3,70%
SMA/SMK	7 orang	25,94%
SMP	1 orang	3,70%
SD	-	-
TOTAL	27 orang	100%

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Sekretaris Daerah	1					1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1					1 orang
Asisten Perekonomian	1					1 orang
Asisten Umum	1					1 orang
Staf Ahli	3					3 orang
Bagian Umum						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		8	3			11 orang
Staf non PNS (naban)					5	5 orang
Bagian Organisasi						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS	2	13		1		16 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		8				8 orang
Staf non PNS (naban)					1	1 orang
Bagian Hukum						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		2				2 orang
Staf PNS		10	1			11 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang
Bagian Protokol						
Kepala Bagian	-	-	-	-	-	- orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		18	4			22 orang
Staf non PNS (naban)					7	7 orang
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan						
Kepala Bagian	-	-	-	-	-	- orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS		4	2			6 orang
Staf non PNS (naban)					-	- orang
Bagian Layanan Pengadaan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS	1	15	1			17 orang
Staf non PNS (naban)					5	5 orang

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		10				10 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang
TOTAL						164 orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	139
2	Access Point	2
3	Active Monitor Speaker + Hardcase	2
4	Adjustable (pipa)	2
5	Air Purifier	32
6	Alat cetak cor	8
7	Alat Penghancur Kertas	2
8	Alat Test Beton/Hammer Test Digital	1
9	Alat Tiup Brass	1
10	Almari Backdrop	1
11	Amplifier	1
12	Antena VHF/FM Portable	2
13	Backdrop	8

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
14	Bailera	3
15	Bateray Charger	2
16	Bed Set	19
17	Big Screen for Presentation (Interactive White Board)	1
18	Bor Beton Listrik	1
19	Bracket Gantung Proyektor	6
20	Brankas	9
21	Buku perpustakaan	698
22	Cabinet	3
23	Cabinet rack + Roller (16 U)	1
24	Calculator	24
25	Cassette & CD Player	2
26	CCTV	6
27	Centre Amplifier	2
28	Chairman Unit	3
29	Clarinet	4
30	Concrete hammer	1
31	Crossover Active	1
32	Delegate Unit	9
33	Digital Reverb & Multi Effect	1
34	Dispenser	35
35	Document Camera/ Visualizer	1
36	Drive rack	1
37	DVD	2
38	Eksternal DVD RW	1
39	Eksternal Hardisk	59
40	Equalizer	3
41	Ethernet Router Wifi	1
42	Faxsimile	8
43	Filling Cabinet/kardek	137
44	Genderang	3
45	Genset	6
46	GPS	2
47	Hand Phone	3
48	Handy Talkie	38
49	Headmachine	1
50	Infrared transmitter	4
51	Jam Dinding	72

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
52	Kabel HDMI 15 M	4
53	Kamera Video/Foto Digital	31
54	Kendaraan roda 4	39
55	Kipas angin	43
56	Komputer/laptop/tablet	333
57	Kotak PPPK	2
58	Kursi Besi/kayu/susun/kerja/makan/tamu/rapat/lipat/hadap	2.113
59	Laser Pointer	7
60	Layar LCD Projector	24
61	Layar OHP	2
62	LCD Proyektor	45
63	Lemari Besi/kayu/kaca/lereg/loker/sorog/rool o pact/rak/pakaian/buffet	314
64	Line Array Bracket System	2
65	Loud speaker management system	1
66	Meja 0,5 biro/1 biro/TV/makan/komputer/rapat/sidang/tulis/telepon/besi/kayu /kubical/bufcet	897
67	Meja Kursi tamu/sofa/sice	21
68	Meja mimbar ruang rapat lantai 3	1
69	Mesin ketik	16
70	Mesin pemotong rumput	5
71	Mesin penghisap debu	8
72	Mesin Pompa Air	25
73	Mesin presensi sidik jari	8
74	Meteran Digital	2
75	Microphone Dynamic/Condensor/Wireless/stand	70
76	Mixer	9
77	Monitor	4
78	Orgen	1
79	Panaboard	3
80	Papan Batas Wilayah	8
81	Papan Nama	2
82	Papan pengumuman	2
83	Papan Visual/ Data Perangkat	1
84	Partisi Rak Buku, Rak Mukena, dan Gate Mushola	1
85	Pathok Batas Wilayah Kelurahan	70
86	Peta	16
87	Peti Cash Kecil	2

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
88	Pilar Batas Utama Type C	56
89	Pilar Batas Utama Type D	80
90	PKBU/PKBA p (Perapatan)	185
91	Podium Acrylic	1
92	Power Amplifier	12
93	Printboard Elektronik + stand	1
94	Printer	113
95	Radio tape	6
96	Rak TV	4
97	Receiver Infrared	2
98	Recorder	8
99	Sangakakala	1
100	Scanner	25
101	Sekat meja	5
102	Sepeda	25
103	Sepeda Motor	39
104	Sketmach Digital	3
105	Snake cable + hard case	1
106	Software Komputer	1
107	Sound System	30
108	Sound System (Antena Distributor)	1
109	Sound System (Braket/flying kit)	6
110	Sound System (Stand mic Krezt dan Crimson)	2
111	Sound System (Stand pro)	2
112	Speaker	28
113	Spliter	1
114	Stabilizer	15
115	Stage Monitor Processor, Sound Standard 1000	1
116	Subwoofer	7
117	Switch managable 16 port	1
118	Tangga	9
119	Telephone	45
120	Tempat sampah	2
121	Termometer	2
122	Terompet	1
123	Thermogun	12
124	Tiang Mik Duduk	7
125	Timbangan	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
126	Tool kit Set	1
127	TV	56
128	Two way line array speaker	8
129	TX/RX Infrared Recevier	4
130	UPS	119
131	Web Camera	3
132	White Board	44
133	Wireless Presentation System	1

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp22.733.759.883 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp11.435.708.000 dan belanja langsung sebesar Rp11.298.051.883 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	1. Kemiskinan masyarakat turun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		2. Pertumbuhan ekonomi meningkat
	3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

Visi	Misi	Sasaran Daerah
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana prasana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang ketujuh dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga mendukung dalam pencapaian sasaran daerah keberdayaan masyarakat meningkat dan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus

memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2020. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama 5 tahun adalah:

1. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--
		Indeks perekonomian	Indeks	--	--	--	--	64,62	69,73
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	86,1	84,95	88,3	93,4	94,2	95,1
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81

Pada tahun 2019 indikator sasaran persentase peningkatan PAD diubah menjadi nilai PAD. Sementara target indikator tersebut yang sebelumnya berupa persentase berubah menjadi nilai nominal. Perubahan indikator dan target tersebut berdasarkan hasil review dari KemenPAN. Review dari KemenPAN menyatakan bahwa indikator dan target sebelumnya tidak bisa menggambarkan proses menuju pada peningkatan karena target setiap tahun tidak selalu naik. Sedangkan dengan indikator dan target yang baru kinerja dapat terlihat karena target setiap tahun selalu meningkat.

Berdasarkan hasil review target indikator nilai PAD tahun 2020 turun menjadi Rp376 milyar. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil perhitungan target PAD perubahan tahun 2020 dengan mendasarkan pada kondisi riil seperti adanya pandemi covid, kondisi ekonomi, dll maka target nilai PAD turun dari Rp571 milyar menjadi Rp376 milyar. Disamping itu adanya perubahan kelembagaan dan tupoksi pada tahun 2021 berimbas juga pada perubahan indikator untuk sasaran strategis kualitas kebijakan perekonomian meningkat dari nilai PAD menjadi indeks perekonomian pada tahun 2021 dan 2022.

Formula dari masing – masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran nilai EKPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.

2. Formula indikator nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{PAD} - (\text{Denda} + \text{Bunga} + \text{Pengembalian})$$

3. Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan:

$$[70\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan} + 30\% \text{ Kinerja Layanan Pengadaan}]$$

❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula:

1.) $RK = \sum_{i-j} RO$

RK = realisasi kegiatan
 RO = realisasi output dari awal s.d akhir

$RO_i = (roi \times BO_i) / 100$

RO_i = realisasi setiap output terhadap kegiatan (tertimbang)
 roi = realisasi setiap output dalam %

$BO_i = \frac{\text{anggaran output} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran output}}$

BO_i = bobot setiap output dalam %

2.) $RD = \sum (RK_{i-j} \times BK_{i-j}) / 100\%$

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$BK_i = \frac{\text{anggaran kegiatan} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran kegiatan}}$

BD = bobot kegiatan dalam %

3.) $RT = \sum (RD_{i-j} \times BD_{i-j}) / 100\%$

RT = realisasi total
 RD = realisasi SKPD/unit kerja

$BD_i = \frac{\text{anggaran SKPD/unit kerja} \times 100\%}{\sum_{i-j} \text{anggaran SKPD/unit kerja}}$

BD = bobot SKPD/unit kerja dalam %
 i = awal
 j = akhir

❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula:

$$\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\% \right]$$

4. Indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah

kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
			2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan
			3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
		Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1 Peraturan Perundang-undangan
			2 Layanan Bantuan Hukum
			3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			2 Pembinaan BUMD dan BLUD
			3 Kerjasama Daerah
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda
			2 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan
			3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
		Program pelayanan pengadaan barang/jasa	1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
			2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa
			3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	1 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
			2 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas
			3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi
		Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	1 Pelayanan Kerumahtangaan
			2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
			3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta
		Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota
			2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta
			3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp571 milyar
3.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	89,4
4.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,5

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 2.518.440.000	APBD TA 2020
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.232.298.184	APBD TA 2020
3.	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 1.457.467.040	APBD TA 2020
4.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 711.141.468	APBD TA 2020
5.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 720.198.000	APBD TA 2020
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 1.735.600.500	APBD TA 2020

- | | | | |
|----|--|------------------|--------------|
| 7. | Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan | Rp 4.170.016.436 | APBD TA 2020 |
| 8. | Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | Rp 2.241.740.000 | APBD TA 2020 |

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp376 milyar
3.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	93,4
4.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,5

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 695.351.400	Perubahan APBD TA 2020
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.114.004.780	Perubahan APBD TA 2020
3.	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 532.494.740	Perubahan APBD TA 2020
4.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 251.932.104	Perubahan APBD TA 2020
5.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 235.359.400	Perubahan APBD TA 2020
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 602.443.460	Perubahan APBD TA 2020
7.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	Rp 2.773.688.652	Perubahan APBD TA 2020
8.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Rp 999.970.240	Perubahan APBD TA 2020

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2020 ada 11 program dan 31 kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%
a	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		
b	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%
a	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor		
b	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%
a	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD		
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	81%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (Nilai ≥ 351)

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum		
b	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan		
c	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%
a	Kegiatan peraturan perundang-undangan		
b	Kegiatan layanan bantuan hukum		
c	Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah		
6	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%
a	Kegiatan perekonomian pengembangan PAD		
b	Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD		
c	Kegiatan kerjasama daerah		
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98%
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
a	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda		
b	Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan		
c	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan		
8	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	82,5%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	82,5%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa		
b	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa		
c	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa		
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%
a	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur		
b	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas		
c	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi		
d	Kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli Kota Yogyakarta		
e	Kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta		
10	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	81,25
a	Kegiatan pelayanan kerumahtangaan		
b	Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah		
c	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta		
11	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan pemanduan kegiatan walikota dan wakil walikota		
b	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta		
c	Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		

Pada tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp35.564.094.725, dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp11.620.731.000 dan belanja langsung sebesar Rp23.943.363.725. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2020 jumlah anggaran turun menjadi Rp22.733.759.883 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp11.435.708.000 dan belanja langsung sebesar Rp11.298.051.883.

2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah

Tabel 2.7
Target Belanja Sekretariat Daerah APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp11.435.708.000	50,3%
Belanja Langsung	Rp11.298.051.883	49,7%
Jumlah	Rp22.733.759.883	100%

Tabel 2.8
Perubahan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020 Per Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.143.518.428
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	681.775.277
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.461.743.151

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	936.688.079
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	487.750.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	448.938.079
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.600.600
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD	12.600.600
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	695.351.400
	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	314.652.600
	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan	260.336.400
	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	120.362.400
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1.114.004.780
	Kegiatan peraturan perundang-undangan	633.124.100
	Kegiatan layanan bantuan hukum	390.949.300
	Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah	89.931.380
6	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	532.494.740
	Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah	122.794.740
	Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD	26.015.000
	Kegiatan kerjasama daerah	383.685.000
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	251.932.104
	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda	38.737.040
	Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan	117.691.120
	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	95.503.944
8	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	235.359.400
	Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa	62.383.000
	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa	70.957.400
	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa	102.019.000
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	602.443.460

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	115.233.040
	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi	145.481.080
	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	167.432.840
	Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	124.064.500
	Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	50.232.000
10	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	2.773.688.652
	Kegiatan pelayanan kerumahtangaan	2.465.298.448
	Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah	205.817.784
	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta	102.572.420
11	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	999.970.240
	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	528.060.000
	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta	359.197.240
	Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	112.713.000
	TOTAL	11.298.051.883

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Rp 1.809.356.180	25,11%	
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Rp 532.494.740	7,39%	
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Rp 487.291.504	6,76%	
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Rp 4.376.102.352	60,73%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Terkait data realisasi kinerja yang disajikan dalam LKIP Setda Tahun 2020 ini ada beberapa yang hanya dapat disampaikan sampai dengan bulan November 2020. Hal ini karena LKIP Setda tahun 2020 harus selesai disusun pada akhir Desember 2020 untuk mentaati ketentuan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 437 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Penanggungjawab Perencanaan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Dokumen Kearsipan Pada Masa Transisi Kelembagaan Baru, sementara ada beberapa data realisasi kinerja yang membutuhkan proses audit atau rekonsiliasi pada bulan Januari 2021 sehingga hal ini menyebabkan data-data tersebut hanya dapat disajikan sampai dengan bulan November 2020 pada LKIP Setda tahun 2020 ini.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	100%
2.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	Rp376 milyar	Rp483,9* milyar	128,69%
3.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	93,4	90,7**	97,11%
4.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80,5	80,45	99,94%

* Realisasi per 30 November 2020 (*unaudited*)

** Realisasi per 29 Desember 2020

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkat

Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pemerintah Daerah (Timda) dalam hal ini BPKP perwakilan DIY dan Inspektorat DIY. Hasil verifikasi dari Timda tersebut berupa skor EPPD Tingkat Regional (Provinsi) yang kemudian dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Timnas). Hasil validasi dari Timnas berupa skor EPPD tingkat nasional. Mekanisme evaluasi seperti itu memungkinkan terdapat perbedaan skor antara Timda dan Timnas.

Realisasi indikator EKPPD tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD), terdiri atas 13 aspek, dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah), terdiri atas 9 aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

$$\begin{aligned} \text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 3,2581 + 0,2 \\ &= 3,4581 \end{aligned}$$

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R).

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2020 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai EKPPD	Sangat tinggi (3,4534)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,4581)	100%	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat tinggi (3,4581)

Indikator nilai EKPPD sejak tahun 2017 selalu memperoleh predikat sangat tinggi dan hasil setiap tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai EKPPD meningkat 6,25% dibandingkan nilai EKPPD tahun 2017.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat Tinggi (3,4581)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai sejak tahun 2017. Namun demikian untuk target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sudah merupakan target tertinggi.

Target EKPPD tahun 2020 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,4581. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), dengan demikian capaian nilai EKPPD tahun 2020 adalah 100%.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 2) Melaksanakan desk pencermatan IKK;
- 3) Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- 4) Melakukan perbaikan atas data IKK yang dinilai ekstrim berdasarkan hasil klarifikasi Timda (Inspektoran DIY dan BPKP Perwakilan DIY)

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi yang belum disertai dengan pedoman penyusunan sehingga dalam menerjemahkan indikator- indikator dalam IKK LPPD kadang kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi regulasi yang baru terbit melalui rapat virtual kurang efektif; dan

- 3) Banyaknya IKK baru yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pemenuhan data dukungunya.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD tahun 2020 telah tercapai dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp695.351.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp687.935.087 atau 98,93%.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima Piagam Penghargaan dari Kemendagri atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,4581 dan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan LPPD Tahun 2018. Namun demikian peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2018 belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penetapan peringkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir adalah untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2017. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2018, Kota Yogyakarta berada di peringkat ke-23 dari 93 daerah Kota secara nasional dengan skor 3,1733 (status: sangat tinggi). Peringkat tersebut berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017. Adapun urutan peringkat daerah kota secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Secara Nasional

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Kota Makasar	1	3,4404	ST
2	Kota Gorontalo	2	3,4142	ST
3	Kota Semarang	3	3,3775	ST
4	Kota Pekanbaru	4	3,3489	ST
5	Kota Tangerang	5	3,3314	ST
6	Kota Cimahi	6	3,3274	ST
7	Kota Madiun	7	3,3056	ST
8	Kota Banjar	8	3,3032	ST
9	Kota Surabaya	9	3,3029	ST
10	Kota Denpasar	10	3,3021	ST

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
11	Kota Bandung	11	3,3019	ST
12	Kota Depok	12	3,2858	ST
13	Kota Kediri	13	3,2769	ST
14	Kota Bontang	14	3,2742	ST
15	Kota Sukabumi	15	3,2637	ST
16	Kota Tasikmalaya	16	3,2622	ST
17	Kota Bekasi	17	3,2546	ST
18	Kota Samarinda	18	3,2297	ST
19	Kota Magelang	19	3,2214	ST
20	Kota Parepare	20	3,2175	ST
21	Kota Metro	21	3,2023	ST
22	Kota Probolinggo	22	3,2015	ST
23	KOTA YOGYAKARTA	23	3,1773	ST
24	Kota Pontianak	24	3,1761	ST
25	Kota Bogor	25	3,1727	ST
26	Kota Padang	26	3,1723	ST
27	Kota Bukittinggi	27	3,1668	ST
28	Kota Bima	28	3,1652	ST
29	Kota Tangerang Selatan	29	3,1352	ST
30	Kota Payakumbuh	30	3,1338	ST
31	Kota Salatiga	31	3,1231	ST
32	Kota Cirebon	32	3,1177	ST
33	Kota Baubau	33	3,1113	ST
34	Kota Surakarta	34	3,0992	ST
35	Kota Pekalongan	35	3,0939	ST
36	Kota Balikpapan	36	3,0890	ST
37	Kota Batam	37	3,0857	ST
38	Kota Banjarmasin	38	3,0708	ST
39	Kota Banjarbaru	39	3,0546	ST
40	Kota Pangkalpinang	40	3,0546	ST
41	Kota Palopo	41	3,0493	ST
42	Kota Palembang	42	3,0427	ST
43	Kota Bitung	43	3,0384	ST
44	Kota Kupang	44	3,0363	ST
45	Kota Serang	45	3,0233	ST
46	Kota Tanjungpinang	46	3,0175	ST
47	Kota Sawahlunto	47	3,0139	ST
48	Kota Tidore Kepulauan	48	3,0123	ST
49	Kota Tebing Tinggi	49	3,0020	ST
50	Kota Tomohon	50	3,0007	ST
51	Kota Padang Panjang	51	2,9968	T
52	Kota Manado	52	2,9939	T
53	Kota Jambi	53	2,9893	T
54	Kota Kotamobagu	54	2,9865	T

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
55	Kota Solok	55	2,9809	T
56	Kota Banda Aceh	56	2,9673	T
57	Kota Prabumulih	57	2,9633	T
58	Kota Mataram	58	2,9623	T
59	Kota Jayapura	59	2,9601	T
60	Kota Palangka Raya	60	2,9338	T
61	Kota Palu	61	2,9253	T
62	Kota Binjai	62	2,8949	T
63	Kota Pariaman	63	2,8900	T
64	Kota Bandar Lampung	64	2,8870	T
65	Kota Dumai	65	2,8702	T
66	Kota Pagaralam	66	2,8660	T
67	Kota Singkawang	67	2,8556	T
68	Kota Tarakan	68	2,8461	T
69	Kota Sungai Penuh	69	2,8413	T
70	Kota Tanjungbalai	70	2,8348	T
71	Kota Sabang	71	2,8128	T
72	Kota Ambon	72	2,8023	T
73	Kota Ternate	73	2,8011	T
74	Kota Blitar	74	2,8003	T
75	Kota Malang	75	2,7942	T
76	Kota Medan	76	2,7890	T
77	Kota Langsa	77	2,7856	T
78	Kota Pematang Siantar	78	2,7802	T
79	Kota Sibolga	79	2,7640	T
80	Kota Lubuklinggau	80	2,7623	T
81	Kota Sorong	81	2,7501	T
82	Kota Batu	82	2,7325	T
83	Kota Lhokseumawe	83	2,7246	T
84	Kota Tual	84	2,7043	T
85	Kota Gunungsitoli	85	2,6833	T
86	Kota Subulussalam	86	2,6809	T
87	Kota Padangsidempuan	87	2,6721	T
88	Kota Mojokerto	88	2,6615	T
89	Kota Cilegon	89	2,6284	T
90	Kota Pasuruan	90	2,6260	T
91	Kota Tegal	91	2,6052	T
92	Kota Bengkulu	92	2,0480	T
93	Kota Kendari	93	1,8027	S

3.2.2 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat

Indikator sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat adalah nilai PAD yang diperoleh dengan formula:

$$\text{PAD} - (\text{Denda} + \text{Bunga} + \text{Pengembalian})$$

$$= \text{Rp}493.023.728.380,84 - (\text{Rp}1.550.479.635 + \text{Rp}6.972.539.445,63 + \text{Rp}619.102.688,56)^*$$

$$= \text{Rp}483.881.606.611,65 *$$

*Data per 30 November 2020 (Unaudited)

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Nilai PAD Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2020 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PAD	Rp661,8 milyar	Rp376 milyar	Rp483,9 milyar*	128,69%	--	--
2	Indeks Perekonomian	--	--	--	--	69,73	

*Data per 30 November 2020 (Unaudited)

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai PAD Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,5%	1,85%	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	Rp483,9 milyar*

*Data per 30 November 2020 (Unaudited)

Indikator nilai PAD adalah hasil review KemenPAN atas SAKIP tahun 2018 sehingga indikator ini baru direalisasikan tahun 2019. Oleh karena itu realisasi indikator ini pada tahun 2017 dan 2018 belum ada. Pada tahun 2017 dan 2018 sasaran ini masih menggunakan indikator persentase peningkatan PAD. Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 memperoleh hasil yang positif, artinya PAD tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat Tabel 3.8 peningkatan PAD tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terjadi lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi dari BPHTB sebesar Rp50 milyar.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai PAD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,50%	1,85%	--	--	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	Rp483,9 milyar*	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--

* Data per November 2020 (*unaudited*)

Pada tahun 2020 untuk indikator ini ditargetkan sebesar Rp376.000.000.000 sementara realisasi PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian per 30 November 2020 (*unaudited*) sebesar Rp483.881.606.611,65. Tingkat capaian indikator nilai pendapatan asli daerah sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \text{realisasi nilai PAD} / \text{target nilai PAD} \times 100\% \\
 &= \text{Rp483.881.606.611,65} / \text{Rp376.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 128,69\%
 \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan upaya pemungutan pajak dan retribusi;
- 2) Meningkatkan pelayanan dengan mengubah pembayaran tunai ke non tunai;
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- 4) Memperbaharui peraturan terkait pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai.

Faktor penghambat dalam pencapaian PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Turunnya daya beli dan perekonomian masyarakat;
- 2) Sejumlah tempat usaha tutup atau tidak beroperasi sehingga mengurangi penerimaan pajak; dan
- 3) Berkurangnya wisatawan sehingga mengurangi pendapatan pajak dan retribusi.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator nilai PAD tahun 2020 telah tercapai dengan capaian sebesar 128,69% walaupun data yang diterima masih per November 2020. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah, kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dan kegiatan kerjasama daerah. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp532.494.740 dengan realisasi anggaran sebesar Rp528.746.880 atau 99,3%.

3.2.3 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat

Indikator sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula:

(30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan)

$$\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\% \right] + \left[\sum \text{Realisasi OPD} \times \text{Bobot OPD} \times 70\% \right]$$

$$= ((48/57 \times 60\% + ((87 + 17)/126 \times 40\%) \times 30\%) + (93,77\% \times 70\%))$$

$$= 25,06 + 65,64$$

$$= 90,7$$

*data per tanggal 29 Desember 2020

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2020 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelaksanaan pembangunan	94,48	93,4	90,7*	97,11%	95,1	95,38%

* Data per tanggal 29 Desember 2020

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks pelaksanaan pembangunan	90,65	94,67	94,48	90,7*

* Data per tanggal 29 Desember 2020

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	90,65	94,67	94,48	90,7*	86,10	84,95	88,30	93,35	94,17	95,14

* Data per tanggal 29 Desember 2020

Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Realisasi indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan sebesar 82,54% menunjukkan bahwa responden puas dengan pelayanan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan.

Indikator ini pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 93,4 sementara realisasinya sebesar 90,7. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\% \\
 &= 90,7 / 93,4 \times 100\% \\
 &= 97,11\%
 \end{aligned}$$

Tingkat capaian untuk indikator indeks pelaksanaan pembangunan belum mencapai 100% karena data realisasi indikator persentase ketepatan pelaksanaan pembangunan yang diperoleh adalah per tanggal 29 Desember 2020. Sementara proses entri data masih berlangsung sampai tanggal 4 Januari 2021. Berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya target 98% untuk indikator persentase ketepatan pelaksanaan pembangunan optimis dapat tercapai.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi;
- 3) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
- 4) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- 5) Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
- 6) Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
- 8) Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
- 9) Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait pengisian data RUP baik melalui rapat virtual maupun dengan pendampingan langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan OPD dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP;
- 10) Untuk mengatasi hambatan dalam permasalahan adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka Pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa; dan
- 11) Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD terkait kelengkapan dokumen pengadaan agar segera ditindaklanjuti.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan (output) dan pengadaan barang/jasa yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena dana dialihkan untuk penanganan covid-19;
- 2) Realokasi/pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi covid;
- 3) Pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat protokol kesehatan;
- 4) Adanya perubahan regulasi dari Pusat terkait pengadaan barang/jasa yakni pencabutan Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang tidak serta merta diikuti dengan peraturan yang baru mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan barang/jasa konstruksi. Pencabutan Putusan MA tersebut terkait segmentasi pasar yang sering dikaitkan dengan kualifikasi usaha (Besar, Menengah dan Kecil) sehingga Pokja Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa mengambil keputusan selama belum ada pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2019 yang telah dicabut tersebut. Sedangkan peraturan pengganti Permen PUPR tersebut terbit tertanggal 15 Mei 2020 yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- 5) Pemahaman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih minim, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam input data SIRUP; dan
- 6) OPD tidak konsisten dalam melakukan revisi dokumen pengadaan apabila ada kesalahan atau kurangnya persyaratan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan waktu pemilihan penyedia barang/jasa tidak tepat.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketidaktercapaian indikator ini hanya bersifat sementara karena belum adanya data final untuk indikator persentase ketepatan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya target indikator persentase ketepatan pelaksanaan pembangunan sebesar 98% dapat tercapai sehingga kemungkinan besar target indikator indeks pelaksanaan pembangunan pun akan tercapai.

Indikator ini ditunjang dengan program pengendalian pelaksanaan pembangunan dan program pelayanan pengadaan barang/jasa. Kegiatan yang mendukung kedua program tersebut adalah kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, kegiatan operasional pengadaan barang/jasa, dan kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa. Anggaran untuk kedua program tersebut sebesar Rp487.291.504 dengan realisasi anggaran sebesar Rp483.863.494 atau 99,3%.

3.2.4 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan

Indikator sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat adalah Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh dengan formula:

Tabel 3.13
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	74	5.871,96
2	Kecamatan	28	2.312,90
3	Puskesmas	77	6.229,20
4	TK dan SD	220	17.686,25
	TOTAL	399*	32.100,31*

* Realisasi tahun 2019

Formula indeks pelayanan publik:

$$= \frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

$$= (5.871,96 + 2.312,9 + 6.229,2 + 17.686,25)/399^*$$

$$= 80,45^*$$

* Realisasi tahun 2019

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2020 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelayanan publik	80,45	80,5	80,45*	99,94%	81	99,32%

* Realisasi tahun 2019

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks pelayanan publik	79,77	80,21	80,45	80,45*

* Realisasi tahun 2019

Realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2020 masih menggunakan data realisasi pada tahun 2019 hal ini karena berdasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/46/PP.06/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Publik menyatakan di dalam isi surat tersebut untuk laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang harus disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2019.

Jika dibandingkan antara realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2020 dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,85%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,77	80,21	80,45	80,45*	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

* Realisasi tahun 2019

Dari Tabel 3.16 bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat pada tahun 2022 belum dapat dicapai pada tahun 2020. Untuk itu pada tahun 2021 belum perlu dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2020 adalah 80,5 tercapai 80,45. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\% \\
 &= 80,45 / 80,5 \times 100\% \\
 &= 99,94\%
 \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
- 3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kurang relevan apabila diterapkan di Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu terutama yang berkaitan Pelayanan Utilitas Kota sehingga pengukuran SKM tidak bisa dilakukan secara mandiri tetapi dengan pihak ketiga dan unsur pelayanan yang digunakan ditambah sesuai dengan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan

- 2) Pelaksanaan survey SKM hanya dapat dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2020 dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan survey tidak bisa maksimal.

Berdasarkan hasil analisis di atas dengan capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar 99,94% dapat dikatakan telah berhasil karena selisih untuk mencapai 100% hanya sebesar 0,06% dianggap tidak berdampak besar. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, dan program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas, kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli Kota Yogyakarta, kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta, kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah Kota Yogyakarta, kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta, dan kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli. Anggaran untuk ketiga program tersebut sebesar Rp4.376.102.352 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.203.762.739 atau 96,06%.

Tabel 3.17
Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	81%	90%	111,11%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai 379,27)	100%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100%
3	Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%	103,38%*	103,38%
4	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98%	93,77%**	95,68%
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)	A*** (Nilai 87,1)	100%
5	Pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	82,5%	84,21%	102,07%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	82,5%	82,54%	100,05%
6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%	90,2%	100,22%
7	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	81,25	81,81	100,69%
8	Pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	80,91	100,32%

* Realisasi per 30 November 2020

** Realisasi per tanggal 29 Desember 2020

*** Realisasi tahun 2018

Indikator persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi tercapai 90%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 27 urusan wajib dan pilihan yang memperoleh kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total 30 urusan wajib dan pilihan.

Indikator nilai perkembangan pembangunan wilayah tercapai nilai 379,27 (cepat berkembang). Realisasi tersebut diperoleh dari total nilai evaluasi perkembangan kelurahan sebesar 17.067 dibagi 45 kelurahan.

Indikator persentase harmonisasi produk hukum daerah tercapai 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari data total jumlah perda, perwal, dan kepwal yang telah diharmonisasi dibagi dengan total jumlah perda, perwal, dan kepwal yang ditetapkan. Jumlah masing-masing produk hukum tersebut yang telah diharmonisasi dan ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perda ada 11 Perda;
2. Jumlah Perwal ada 154 Perwal; dan
3. Jumlah Kepwal ada 494 Kepwal.

Indikator persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah tercapai 103,38%. Realisasi tersebut diperoleh dari penerimaan PAD sampai dengan tanggal 30 November 2020 sebesar Rp493.023.728.380,84 dibagi dengan nilai target PAD perubahan sebesar Rp476.918.678.411,89.

Indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan per tanggal 29 Desember 2020 tercapai 93,77%. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil perhitungan realisasi output kegiatan semua OPD/Unit Kerja dengan menggunakan pembobotan berdasarkan nilai anggaran.

Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercapai 87,1 (A). Realisasi tersebut merupakan capaian penilaian SAKIP Setda tahun 2018 karena hasil penilaian SAKIP Setda tahun 2019 belum keluar hasilnya. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian 5 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Masing-masing komponen memperoleh poin sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja memperoleh poin 28,3;
2. Pengukuran kinerja memperoleh poin 20,63;
3. Pelaporan kinerja memperoleh poin 13,21;
4. Evaluasi internal memperoleh poin 7,56; dan
5. Capaian kinerja memperoleh poin 17,41.

Indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu tercapai 84,21%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 48 paket tender yang tepat waktu dibagi dengan total 57 paket tender.

Indikator persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan tercapai 82,54%. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 104 responden internal dan eksternal yang puas terhadap pelayanan pengadaan dibagi total 126 responden internal dan eksternal.

Indikator persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi tercapai 90,2%. Realisasi tersebut diperoleh dari data 46 OPD/Unit Kerja yang telah memenuhi ketepatan terhadap susunan organisasi, tupoksi, beban kerja, dan ketatalaksanaan dibagi total 51 OPD/Unit Kerja.

Indikator indeks kepuasan layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan tercapai 81,81. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 10 unsur pelayanan oleh 40 responden dengan menggunakan skala likert.

Indikator indeks kepuasan layanan keprotokolan tercapai 80,91. Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 13 unsur pelayanan oleh 145 responden dengan menggunakan skala likert.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp10.692.351.067,9 atau 94,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp7.014.024.473,72 atau 97,35% sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp3.678.326.593,58 atau 89,87%. Penyerapan anggaran terbesar pada program pengendalian pelaksanaan pembangunan sebesar 99,94% sedangkan penyerapan terkecil pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 87,52%. Secara rinci realisasi anggaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan	11.435.708.000	10.128.323.175	88,57

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.143.518.428	2.846.259.441,55	90,54
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	681.775.277	516.807.662	75,80
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.461.743.151	2.329.451.779,55	94,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	936.688.079	819.747.052,03	87,52
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	487.750.000	484.862.544,03	99,41
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	448.938.079	334.884.508	74,59
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.600.600	12.320.100	97,77
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD	12.600.600	12.320.100	97,77
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	695.351.400	687.935.086,72	98,93
	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	314.652.600	314.412.123,36	99,92
	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan	260.336.400	253.250.463,36	97,28
	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	120.362.400	120.272.500	99,93
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1.114.004.780	1.109.716.272,8	99,62
	Kegiatan peraturan perundang-undangan	633.124.100	630.624.100	99,61
	Kegiatan layanan bantuan hukum	390.949.300	390.263.200	99,82
	Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah	89.931.380	88.828.972,8	98,77
6	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	532.494.740	528.746.880	99,30
	Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah	122.794.740	122.396.380	99,68
	Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD	26.015.000	25.795.000	99,15
	Kegiatan kerjasama daerah	383.685.000	380.555.500	99,18
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	251.932.104	251.791.078	99,94
	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda	38.737.040	38.722.780	99,96
	Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan	117.691.120	117.625.340	99,94

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	95.503.944	95.442.958	99,94
8	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	235.359.400	232.072.416,6	98,60
	Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa	62.383.000	61.316.468,8	98,29
	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa	70.957.400	70.874.914,4	99,88
	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa	102.019.000	99.881.033,4	97,90
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	602.443.460	577.326.670	95,83
	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	115.233.040	115.034.780	99,83
	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi	145.481.080	140.273.560	96,42
	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	167.432.840	164.403.580	98,19
	Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	124.064.500	112.810.750	90,93
	Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	50.232.000	44.804.000	89,19
10	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	2.773.688.652	2.670.973.373,2	96,30
	Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan	2.465.298.448	2.437.721.905,6	98,88
	Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah	205.817.784	149.728.610,4	72,75
	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	102.572.420	83.522.857,2	81,43
11	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	999.970.240	955.462.696,4	95,55
	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	528.060.000	518.814.560,2	98,25
	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	359.197.240	328.553.523,2	91,47
	Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli	112.713.000	108.094.613	95,90
	TOTAL	11.298.051.883	10.692.351.067,3	94,64

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi dan

dapat dikatakan terjadi efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	100	1.809.356.180	1.797.651.359	99,35
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai PAD	Rp376 milyar	Rp483,9* milyar	128,69	532.494.740	528.746.880	99,30
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	93,4	90,7**	97,11	487.291.504	483.863.494	99,30
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,5	80,45***	99,94	4.376.102.352	4.203.762.739	96,06
Total belanja pendukung						4.092.807.107	3.678.326.593	89,87
Total belanja langsung						11.298.051.883	10.692.351.067	94,64

* Realisasi per 30 November 2020

** Realisasi per 29 Desember 2020

*** Realisasi tahun 2019

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	100%	99,35%	0,65%
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai PAD	128,69%	99,30%	0,7%
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	97,11%	99,30%	0,7%
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	99,94%	96,06%	3,94%

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Sekretariat Daerah kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran yang terjadi karena telah melakukan efisiensi. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp11.704.820.
2. Sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat telah mencapai kinerja sebesar 128,69% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3.747.860.
3. Sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 97,11% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3.428.009.
4. Sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat telah mencapai kinerja sebesar 99,94% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp172.339.612.

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

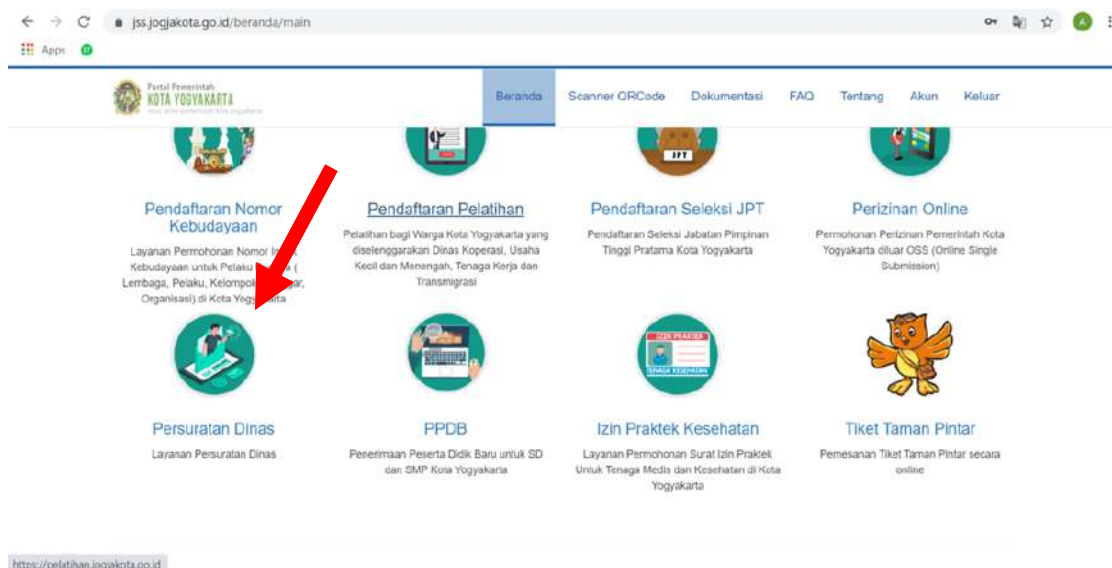
Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik saat ini dituntut berjalan dengan efektif dan efisien. Masyarakat sangat berharap terhadap tingginya tingkat respon dan layanan yang semakin bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel. Penyesuaian terhadap kondisi demikian dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi sejalan dengan upaya pemenuhan jalannya pemerintahan dalam kerangka pembangunan ekosistem e-Government dan perwujudan smart city.

Saat ini arus kecenderungan Revolusi Industri 4.0 menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan amanat bahwa pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pengelolaan sistem dan data secara menyeluruh dan terintegrasi menjadi prasyarat menuju penyempurnaan pelayanan birokrasi yang jauh lebih mudah dan singkat. Implementasi teknologi informatika dan cyber dalam wujud *internet of things* dengan segala bentuk media serta aplikasinya dalam area proses pengelolaan birokrasi yang tepat akan menjadi akselerasi bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu upaya perwujudan kemudahan

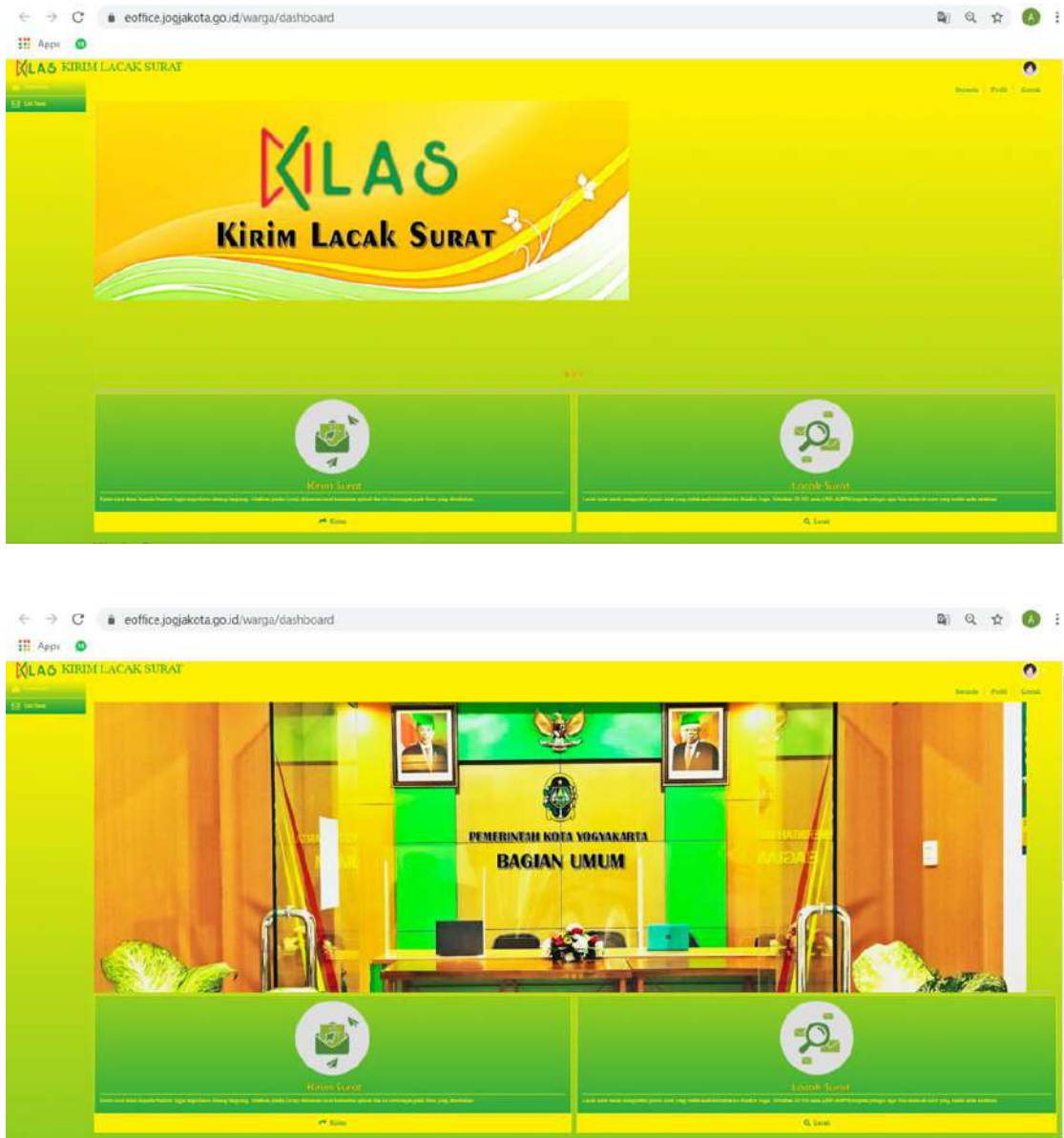
layanan adalah bentuk penyediaan saluran komunikasi masyarakat melalui media sejenis surat elektronik yang sekilas segera akan mencapai tujuan dan sasarannya melalui layanan 'KILAS'.

KILAS adalah Kirim Lacak Surat yang diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Suatu layanan publik dalam bentuk aplikasi online yang dibangun untuk dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat melakukan komunikasi dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Masyarakat dapat menyampaikan keperluannya, yaitu: menulis surat biasa atau undangan melalui bentuk isian format sejenis surat elektronik yang telah tersedia, mengirimkan, dan selanjutnya melakukan penelusuran dan pelacakan atas surat tersebut sampai sejauh mana telah berproses dan melacak surat yang dikirimkan secara manual lewat Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta berdasarkan tanda terima yang diberikan pada saat mengirim surat. Layanan KILAS telah terintegrasi ke dalam sistem aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dengan demikian pengelolaan data dan penggunaanya telah menyatu membentuk dalam basis satu data. Masyarakat dapat melakukan akses ini melalui JSS dengan memilih menu Layanan Umum kemudian memilih menu Persuratan Dinas. Penggunaan layanan KILAS bertujuan untuk memberikan kemudahan alur surat dinas bagi masyarakat yang lebih bercitra dan berstandar kekinian dan tentunya lebih singkat, cepat serta menjawab tuntutan kinerja layanan yang lebih dinamis dan solutif.

Gambar 3.1
Tampilan Masuk Aplikasi KILAS Pada Halaman JSS



Gambar 3.2
Tampilan Halaman Utama Aplikasi KILAS

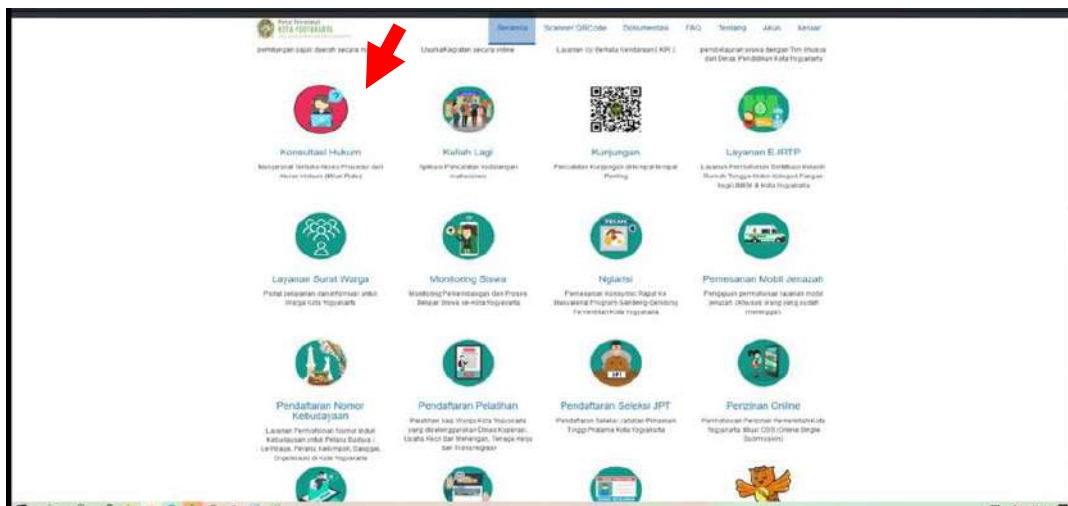


Sejak tahun 2016, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah membuka layanan konsultasi hukum bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Konsultasi hukum tersebut dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara masyarakat dengan petugas di Kantor Bagian Hukum. Berdasarkan data buku konsultasi hukum sampai dengan tahun 2019 tidak banyak masyarakat yang

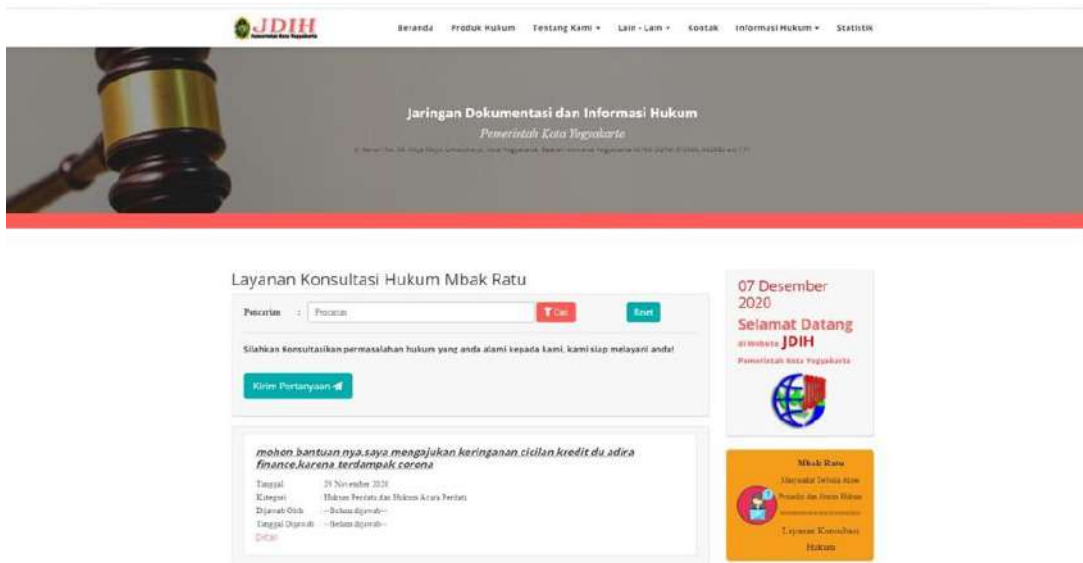
memanfaatkan layanan ini. Hambatan yang ada adalah kurangnya sosialisasi sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan seringkali masyarakat yang datang dan hendak melakukan konsultasi tidak dapat bertemu dengan petugas yang memiliki kompetensi.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini, maka kami membuka layanan klinik konsultasi hukum berbasis teknologi informasi melalui website Bagian Hukum, yakni <http://hukum.jogjakota.go.id>. Melalui website Bagian Hukum yang telah ditambah fitur klinik konsultasi hukum “MBAK RATU” masyarakat dapat mengakses dimanapun mereka berada dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum. Sama seperti aplikasi KILAS layanan konsultasi hukum juga telah terintegrasi dengan layanan JSS.

Gambar 3.3
Tampilan Masuk Layanan Konsultasi Hukum Pada Halaman JSS



Gambar 3.4
Tampilan Halaman Utama Layanan Konsultasi Hukum Mbak Ratu



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 dapat disimpulkan:

1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu: nilai EKPPD, nilai PAD, indeks pelaksanaan pembangunan, dan indeks pelayanan publik semuanya tercapai.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai EKPPD dengan tingkat capaian 100%;
 - b. Nilai PAD dengan tingkat capaian 128,69%;
 - c. Indeks pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 97,11%; dan
 - d. Indeks pelayanan publik dengan tingkat capaian 99,94%.
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai EKPPD adalah:
 - a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. Melaksanakan desk pencermatan IKK;
 - c. Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan
 - d. Melakukan perbaikan data IKK yang dinilai ekstrim berdasarkan hasil klarifikasi Timda (Inspektorat DIY dan BPKP Perwakilan DIY).
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai PAD adalah:
 - a. Meningkatkan upaya pemungutan pajak dan retribusi;
 - b. Meningkatkan pelayanan dengan mengubah pembayaran tunai ke non tunai;
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi; dan
 - d. Memperbaharui peraturan terkait pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai.

-
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah:
- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi;
 - c. Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
 - d. Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
 - e. Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
 - f. Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
 - h. Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
 - i. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait pengisian data RUP baik melalui rapat virtual maupun dengan pendampingan langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan OPD dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP;
 - j. Untuk mengatasi hambatan dalam permasalahan adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka Pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa; dan
 - k. Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD terkait kelengkapan dokumen pengadaan agar segera ditindaklanjuti.
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah:
- a. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
 - c. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

7. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp605.700.815 atau 5,36%.

Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

LAMPIRAN

Penghargaan Kota Peduli HAM



Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Keluaran				Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran	
			Program/Kegiatan/Keluaran					Target					
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							1. Kerjasama pengembangan JDJH dengan BPHN		10%	40%	70%	100%	7.250.000
							2. Frekuensi penyuluhan hukum kepada masyarakat		0%	0%	0%	100%	145.700.000
							3. Keluaran sadar hukum yang dibina		18%	45%	73%	100%	58.325.000
							4. Himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan		0%	25%	63%	100%	201.582.800
							5. Website hukum yang dikelola		25%	50%	75%	100%	81.591.384
							6. Anggota JDJH Pemkot Yogyakarta		10%	40%	70%	100%	14.000.000
2	Kualitas Kebijakan Perencanaan Meningkatkan	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp571 milyar	Rp571 milyar	Rp571 milyar	Rp571 milyar	Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Perencanaan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Data target dan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun 2. Monitoring dan evaluasi pencapaian pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang dilaporkan 3. Rencana target pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD yang sah perubahan tahun 2020 dan mumi tahun 2021 yang disusun 4. Bahan pendukung kebijakan pajak daerah yang disusun 5. Bahan pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun 6. Studi/ kajian pajak yang disusun 7. Data pembagakan mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui 8. Data perencanaan yang diperbarui Pembinaan BUMD dan BLUD 1. Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun 2. Monitoring dan Evaluasi tri wulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan 3. Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan Tahun 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun 4. Dokumen kelengkapan operasional BPR syariah yang disusun 5. Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun 6. Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui Kerjasama Daerah 1. Telaah Rencana Kerjasama Daerah yang disusun 2. Dokumen Penawaran Kerjasama Daerah yang disusun 3. Dokumen Kerjasama Daerah yang disusun 4. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah dan Dokumen Pendukungnya yang disusun 5. Sistem Informasi Kerjasama Daerah yang diperbarui 6. Dokumen Hasil Audit Objek Kerjasama Daerah yang disusun 7. Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama yang disusun 8. Dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/ dicatatkan di Notaris yang 9. Fasilitas Kegiatan Keanggotaan Dalam Organisasi Nasional dan Internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC) 10. Iuran Keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC yang Terbayar	100%	100%	100%	100%	1.457.467.040	
							Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah		100%	100%	100%	100%	1.457.467.040
							1. Dokumen		20%	50%	90%	100%	346.176.040
							1. Dokumen		25%	50%	85%	100%	20.880.000
							2. Dokumen		10%	60%	90%	100%	5.481.000
							1. Dokumen		0%	0%	25%	100%	1.392.000
							2. Dokumen		10%	30%	90%	100%	92.204.000
							1. Dokumen		15%	85%	100%	100%	191.218.000
							1. Dokumen		15%	40%	85%	100%	2.436.000
							1. Dokumen		15%	60%	90%	100%	30.997.040
													331.625.000
							1. Dokumen		31%	58,50%	73,50%	100%	2.253.000
							8. Dokumen		31,25%	50%	73,13%	100%	14.355.000
							2. Dokumen		32,50%	50%	91%	100%	3.540.000
							4. Dokumen		0%	0%	0%	100%	181.200.000
							2. Dokumen		1,75%	25,75%	35,75%	100%	127.694.000
							1. Dokumen		39%	66%	81%	100%	2.583.000
													779.666.000
							30. Kajian/ telaah		30%	50%	80%	100%	91.539.000
							2. Penawaran		37,50%	62,50%	100%	100%	154.806.000
							50. Dokumen		24,99%	49,98%	74,97%	100%	1.880.000
							1. Dokumen		37,50%	62,50%	100%	100%	14.000.000
							2. Sistem		24,99%	49,98%	74,97%	100%	500.000
							1. Dokumen		28%	50%	85%	100%	12.000.000
							2. Dokumen		30%	60%	90%	100%	224.541.000
							10. Dokumen		25%	50%	75%	100%	15.450.000
							4. Lembaga		30%	60%	90%	100%	151.450.000
							4. Iuran		30%	60%	90%	100%	113.500.000
3	Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	89,4	89,4	89,4	89,4	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Nilai akuntabilitas kinerja Setda Kota Yk meningkat		94,5% A (>80 s.d 90)	94,5% A (>80 s.d 90)	94,5% A (>80 s.d 90)	94,5% A (>80 s.d 90)	711.141.388
													51.044.000
							1. Renja Setda		30%	55%	92,50%	100%	2.852.000
							2. RUP Setda		33%	45%	78%	100%	34.701.040
							3. Perjanjian Kinerja Setda		45,75%	55,50%	86,50%	100%	6.172.000
							4. Rencana aksi dan money rencana aksi setda		40%	55%	70%	100%	3.180.000
							1. Dokumen kinerja setda		32,50%	55%	77,50%	100%	2.320.000

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pengendalian Keuangan sekretariat Daerah 1. Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda 2. Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 1. Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun 2. Dokumen Penataan dan Pemusnahan Arsip Rahasia yang disusun Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota 1. Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah 2. Penerimaan Audiensi dan Silaturahmi Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1. Latihan Korp Musik 2. Apel dan Upacara 3. Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta 4. Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli 1. Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli 2. Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 3. Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	17 13 360 48 176 240 46	17,65% 23,08% 16,11% 10,42% 26,38% 24,99% 15,79%	35,29% 46,15% 37,22% 50% 43,96% 49,98% 68,42%	82,35% 76,92% 73,61% 77,08% 70,43% 74,97% 84,21%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	214.905.000 94.250.000 469.859.840 752.384.160 156.499.000 65.966.000 79.133.000 11.400.000

Yogyakarta, 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Dr. Aman Yuridijaya, MM
NIP. 19651213 199203 1 006

PERUBAHAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
Tahun : 2020

No	Sasaran	Indikator	Target Tw IV	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran Perubahan
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	81%	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)	695.351.400
				Penyelenggaraan pemerintah Umum				314.652.600
				1. Buku LKPI Beserta Lampirannya yang disusun	3 Buku	100%		47.478.200
				2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPI yang disusun	1 Dokumen	100%		2.710.000
				3. Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 Buku 50 eksp	100%		62.033.400
				4. ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	100%		-
				5. Fasilitas Forpi difasilitasi	4 Orang	100%		197.856.000
				6. Monitoring dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	100%		4.575.000
				Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan				260.336.400
				1. Monev pelaksanaan urusan kewenangan pemerintah daerah yang dilaporkan	2 dokumen monev	100%		1.466.000
				2. Pendampingan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan pendampingan	100%		109.152.400
				3. Data wilayah dan evaluasi kinerja/ perkembangan kecamatan dan kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan	100%		149.718.000
				Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat				120.362.400
				1. Fasilitas penyelenggaraan ibadah Haji yang dilaksanakan	2 kali	100%		3.375.000
				2. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen	100%		116.987.400
				Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum				1.114.004.780
				Penyusunan peraturan Perundang-Undangan	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%		633.124.100
				1. Draf Raperda	6 Raperda	100%		411.898.600
				2. Perwal	56 Perwal	100%		52.645.500
				3. Kepwal	350 Kepwal	100%		580.000
				4. Raperda yang dipublikasikan ke media cetak	10 Halaman raperda	100%		168.000.000
				Layanan Bantuan Hukum				390.949.300

No	Sasaran	Indikator	Target Tw IV	Program/Kegiatan/Keluaran		Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Tw IV	Anggaran Perubahan
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				<ol style="list-style-type: none"> Perkara/ Sengketa yang ditangani Laporan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang disusun Jumlah Raperda/ Raperwal yang diharmonisasi dari perspektif HAM Konsultasi hukum untuk masyarakat 		<ol style="list-style-type: none"> 10 Perkara 1 Laporan bantuan hukum untuk masyarakat miskin 2 Raperda/ raperwal 12 Bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 354.970.300 13.650.000 22.329.000 -
				Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah				89.931.380
				<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama pengembangan JDIH dengan BPHN Kelurahan sadar hukum yang dibina Website hukum yang dikelola Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta 		<ol style="list-style-type: none"> 5 Bulan 5 Bulan 1 Website 14 Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 6.750.000 400.000 81.341.380 1.440.000
2	Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp376 milyar	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%	532.494.740
				<ol style="list-style-type: none"> Data target dan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun Monitoring dan evaluasi pencapaian pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang dilaporkan Rencana target pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD yang sah perubahan tahun 2020 dan murni tahun 2021 yang disusun Bahan pendukung kebijakan pajak daerah yang disusun Bahan pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun Data lembaga keuangan mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui Data perekonomian yang diperbarui 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 200.000 7.695.000 2.170.000 269.000 86.573.000 1.319.000 24.568.740 	
				Pembinaan BUMD dan BLUD				26.015.000
				<ol style="list-style-type: none"> Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun Monitoring dan Evaluasi triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan Tahun 2020 dan Murni Tahun 2021 yang daissusun Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 360.000 3.843.000 448.000 20.484.000 880.000 	
				Kerjasama Daerah				383.685.000
				<ol style="list-style-type: none"> Telaah Rencana Kerjasama Daerah yang disusun Dokumen Penawaran Kerjasama Daerah yang disusun Dokumen Kerjasama Daerah yang disusun Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah dan Dokumen Pendukungnya yang disusun Sistem Informasi Kerjasama Daerah yang diperbarui Dokumen Hasil Audit Objek Kerjasama Daerah yang disusun Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama yang disusun Dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/ dicatatkan di Notaris yang disusun 	<ol style="list-style-type: none"> 30 kajian/telaah 2 penawaran 50 dokumen 1 dokumen 2 sistem 1 dokumen 2 dokumen 10 dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 45.752.000 838.000 274.000 13.000.000 12.800.000 20.000.000 230.361.000 2.000.000 	

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Keluaran		Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran Perubahan
			5	6		Tw IV	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Operasional Pengadaan Barang/ Jasa 1. Persiapan pengadaan barang/jasa yang didampingi 2. Pemilihan penyedia pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan 3. Katalog daerah yang dilaksanakan 4. Kinerja pengadaan yang dilaksanakan 5. SOP teknis pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang disusun	1 Kali 1 Kali 1 Dokumen katalog daerah 1 Kali 2 Jenis	100% 100% 100% 100% 100%	70.957.400 6.879.600 60.730.000 688.800 1.246.000 1.413.000	
				Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa 1 Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola 2. Strategi dan informasi pengadaan barang/ jasa 3. Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan 4. Peraturan walikota pengadaan barang/ jasa yang disusun	1 Dokumen permasalahan dan resiko 1 Dokumen strategi dan informasi 19 Kali 1 Perwal	100% 100% 100% 100%	102.019.000 43.713.600 28.574.200 29.157.000 574.200	
4	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif 2. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan 3. Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan 4. Dokumen Evaluasi Pola Karier 5. Dokumen Resiko Jabatan 6. Dokumen Pengembangan Aparatur 7. Dokumen Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja	4 Perangkat Daerah/ Unit kerja 46 Perangkat Daerah/ Unit Kerja 1 Dokumen evaluasi 1 Dokumen evaluasi 1 Dokumen resiko jabatan 1 Dokumen pengembangan aparatur 1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	100% 100% 100% 100% 100% 100%	115.233.040 1.140.000 26.480.000 45.167.040 10.300.000 10.000.000 10.435.000 11.711.000	
				Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas 1. Draf Perwal/ Kepwal Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang disusun 2. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang disusun 3. Dokumen Pendampingan Penyusunan SOP yang disusun 4. Pendampingan tatalaksana 5. Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik yang disusun 6. Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang Diikuti 7. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	3 Draf perwal/ kepwal 1 Dokumen raperwal 1 Dokumen pendampingan 15 Perangkat daerah/unit kerja 1 Dokumen pembinaan 1 Kali 1 Dokumen	100% 100% 100% 100% 100% 100%	145.481.080 13.357.000 40.000.000 638.000 67.902.080 20.078.000 1.371.000 2.135.000	
				Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1. Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah 3. Dokumen Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100% 100%	167.432.840 49.060.000 60.453.040 51.980.000	

No	Sasaran	Indikator	Target	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	Anggaran Perubahan
			Tw IV			Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Frekuensi Latihan Korp Musik 2. Frekuensi Apel dan Upacara 3. Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta 4. Frekuensi Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli 1. Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli 2. Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 3. Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	5 kali 8 kali 330 kali 30 Kali 220 kali 240 kali 30 kali	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	24.915.000 5.000.000 179.032.240 150.250.000 112.713.000 32.480.000 79.133.000 1.100.000

Yogyakarta, 13 November 2020
SEKRETARIS DAERAH

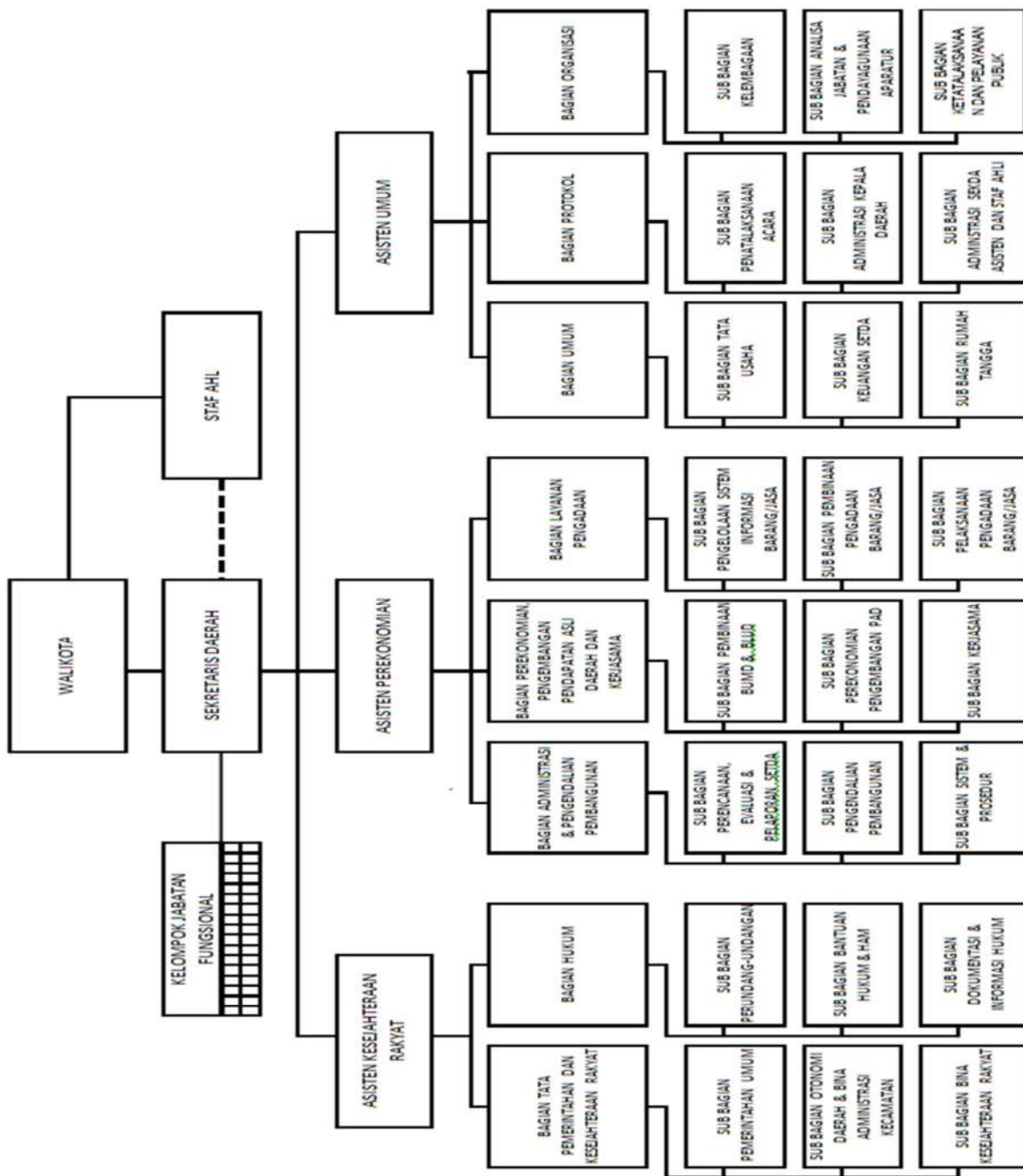


PERENCANAAN STRATEGIS (Matriks Renstra 5 Tahun)

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan
Misi 17: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD					Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Target Program PD						
			2017	2018	2019	2020	2021				2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Efektivitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Persentase Kinerja Pemerintahan Urusan Tinggi dan Sangat Tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%	75%	77%	79%	81%	83%	85%
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,4%	0,44%	--	--	--	Program peningkatan perekonomian, pengembalian pendapatan asli daerah dan kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	Rp545 milyar	Rp547 milyar	--	--	--	--
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	--	--	64,62	69,73	69,73	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian target PAD	Realisasi PAD/Target PAD	Realisasi PAD/Target PAD	--	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	--	--	84,95	95,1	95,1	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	--	--	--	50%	55%	55%
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	84,95	88,3	94,2	94,2	Program pelayanan pengadaan barang/jasa	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektoral	Bobot perencanaan 30% + bobot pengurangan kinerja 25% + bobot pelaporan bobot 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot evaluasi sasaran/kinerja organisasi 20%	Bobot perencanaan 30% + bobot pengurangan kinerja 25% + bobot pelaporan bobot 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot evaluasi sasaran/kinerja organisasi 20%	--	--	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,50	Program peningkatan kapasitas dan kelengkapan data dan informasi pemerintahan daerah	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu yang sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilampirkan x 100%	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu yang sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilampirkan x 100%	70,0%	60,0%	75,0%	82,5%	85,0%	88,0%
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,50	Program peningkatan kapasitas dan kelengkapan data dan informasi pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	(Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan tupoksi, beban kerja dan ketatakelolaan / jumlah seluruh OPD) x 100%	(Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan tupoksi, beban kerja dan ketatakelolaan / jumlah seluruh OPD) x 100%	60%	70%	80%	90%	95%	100%
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,50	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat kerantaman kerumah tanggungan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat kerantaman kerumah tanggungan	Hasil survey responden	Hasil survey responden	780	785	790	8125	8135	8145
Meningkatkan perekonomian dan partisipasi yang berkualitas	Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,50	Program pelayanan kebidanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	Hasil survey responden	Hasil survey responden	80,00	80,25	80,45	80,65	80,75	81,00

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 520332; EMAIL : sekda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM.
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Pihak Kedua

H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
NIP. 196512131992031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp 571 milyar
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	89,40
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,50

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 2.518.440.000	APBD TA 2020
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.232.298.184	APBD TA 2020
3. Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 1.457.467.040	APBD TA 2020
4. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 711.141.468	APBD TA 2020
5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 720.198.000	APBD TA 2020
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 1.735.600.500	APBD TA 2020
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Rp 4.170.016.436	APBD TA 2020
8. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Rp 2.241.740.000	APBD TA 2020

Yogyakarta, 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Walikota Yogyakarta

H. HARYADI SUYUTI


I. Aman Yuridijaya, MM
NIP. 19651213 199203 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 520332; EMAIL : sekda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM.
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 NOV 2020

Pihak Kedua

H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama

PEMERINTAH KOTA
SEKRETARIAT
Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
NP. 196512131992031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp 376 milyar
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	93,4
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 695.351.400	Perubahan APBD TA 2020
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.114.004.780	Perubahan APBD TA 2020
3. Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 532.494.740	Perubahan APBD TA 2020
4. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 251.932.104	Perubahan APBD TA 2020
5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 235.359.400	Perubahan APBD TA 2020
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 602.443.460	Perubahan APBD TA 2020 dan Perubahan BKK Danais TA 2020
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Rp 2.773.688.652	Perubahan APBD TA 2020
8. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Rp 999.970.240	Perubahan APBD TA 2020

Yogyakarta, 12 NOV 2020

Sekretaris Daerah
Kota Yogyakarta



PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Sangat tinggi (3.4581)	100%	Realisasi indikator EKPPD tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD), terdiri atas 13 aspek, dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah), terdiri atas 9 aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Nilai ICK diperoleh sebesar 3.2581 dan nilai IKK diperoleh sebesar 0.2.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	695.351.400	687.935.086,72	98,93%	
2	Kualitas Kebijakan Perencanaan Meningkat	Nilai Pendapat Asli Daerah	Rp.76 milyar	Nilai Pendapat Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	483.881.606.611,65	128,69%	Data per tanggal 30 November 2020 (unaudited): Nilai PAD Rp.493.023.728.380,84; Nilai denda Rp.1.550.479.635 ; Nilai bunga Rp.6.972.539.445,63; Nilai pengembalian Rp.619.102.688,56	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1.114.004.780	940.351.172,80	84,41%	Realisasi s.d bulan November
3	Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	93,4	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	90,65	97,06%	Realisasi ketepatan pelaksanaan pembangunan berdasarkan data per tanggal 28 Desember 2020 sebesar 93,7%.	Program Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	532.494.740	476.314.880,00	89,45%	Realisasi s.d bulan November
							Hasil survei kepuasan pelanggan s.d TW IV tahun 2020: responden internal puas sebanyak 87 dari 108 responden yang disurvei, responden eksternal puas sebanyak 17 dari 18 responden yang disurvei. Jumlah paket tender yang tepat waktu s.d TW IV tahun 2020 sebanyak 48 paket dari total tender yang sudah terlaksana sebanyak 57 paket.	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	251.932.104	251.791.078	99,94%	
								Program Pelayanan Pengadaan Barang/asa	235.359.400	232.072.416,60	98,60%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
4	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayan Publik	80,5	Hasil Survey Kepuasan Layanan Eksternal dan Internal	80,45	99,94%	Realisasi Indikator indeks pelayanan publik tahun 2020 masih menggunakan data realisasi pada tahun 2019 hal ini karena berdasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/46/PP.06/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Publik menyatakan di dalam isi surat tersebut untuk laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang harus disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2019.	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan dan Ketatakelolaan Pemerintahan Daerah	602.443.460	505.612.670,00	83,93%	Realisasi s.d bulan November
								Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahanggunaan	2.773.688.652	2.128.988.775,20	76,76%	Realisasi s.d bulan November
								Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	999.970.240	816.457.221,80	81,65%	Realisasi s.d bulan November

Faktor Pendorong :
 Urutan Permasalahan :
 Rencana Tindak Lanjut:

Yogyakarta, 28 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH



SEKRETARIS DAERAH
 DAERAH DAERAH DAERAH
 192031006

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
4	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,5	Hasil Survey Kepuasan Layanan Eksternal dan Internal	80,45	99,94%	Realisasi indikator indeks pelayanan publik tahun 2020 masih menggunakan data realisasi pada tahun 2019 hal ini karena berdasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/46/PP.06/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Publik menyatakan di dalam isi surat tersebut untuk laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang harus disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2019.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	602.443.460	505.612.670,00	83,93%	Realisasi s.d bulan November
								Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	2.773.688.652	2.128.988.775,20	76,76%	Realisasi s.d bulan November
								Program Pelayanan Kelembagaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	999.970.240	816.457.221,80	81,65%	Realisasi s.d bulan November

Faktor Pendorong :
 Urain Permasalahan :
 Rencana Tindak Lanjut:

Yogyakarta, 28 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH

PARAF HIRARKI/KOORDINASI	
JARATAN	PARAF TANGGAL
Asistant Persekonom	
Pit ka bag Abn Diklat	08/12/20



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax.(0274) 520332

EMAIL: admindalbang@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN SEBELUMNYA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan evaluasi atas rencana aksi sampai pada tahap memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan	Dilakukan evaluasi setiap triwulan sampai pada tahap memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi

Yogyakarta, Januari 2020
Kepala Bagian
Administrasi dan Pengendalian Pembangunan



R. WAHYU HANDOYO H. P., S.T., M.A., MTP
NIP. 197204111998031007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax.(0274) 520332

EMAIL: admindalbang@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN SEBELUMNYA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan evaluasi atas rencana aksi sampai pada tahap memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan	Dilakukan evaluasi setiap triwulan sampai pada tahap memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi

Yogyakarta, Januari 2020

Kepala Bagian

Administrasi dan Pengendalian Pembangunan



R. WAHYU HANDOYO H. P, S.T.,M.A.,MTP

NIP. 197204111998031007



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUKARNO NO. 69, JAKARTA 12136, TELEFON (021) 7394311-7394332, FAKS (021) 7394333
SITUS Web: www.panrb.go.id

Nomor: Bi 16 /PP.06/2020
Sifat: Biasa
Lampiran: -
Hal: Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Publik
18 Maret 2020

Yth

1. Para Sekretaris/Sestama/Sekjen Kementerian/Lembaga
 2. Para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia
 3. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia
- di
Tempat.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, serta memperhatikan:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, dan melaporkan hasil survei kepada Kementerian PANRB;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dihimbau untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sampai dengan satuan kerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup permasalahan;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan.

**PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN**

TANGGAL TERIMA: 18/03/2020

660

Bersama ini kami mohon perhatian Saudara kiranya dapat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut kepada Menteri PANRB cq. Deputi Bidang Pelayanan Publik, melalui email tu.yanlik@menpan.go.id dan melalui surat selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2020 dengan detail sebagai berikut:

1. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang disampaikan adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2019;
2. Laporan pelaksanaan forum konsultasi publik adalah pelaksanaan forum konsultasi publik pada tahun 2020;
3. Laporan penetapan dan penerapan standar pelayanan publik dapat melampirkan dokumen standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik serta bukti dukung dokumentasi publikasi dari standar pelayanan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Menteri PANRB;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 473TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN ANGGARAN,
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH DAN PENGELOLAAN DOKUMEN KEARSIPAN
PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN BARU**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi masa transisi kelembagaan baru sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan penanggungjawab perencanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan dokumen kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama sampai dengan selesainya penataan kelembagaan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penanggungjawab Perencanaan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Dokumen Kearsipan pada Masa Transisi Kelembagaan Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN ANGGARAN, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN DOKUMEN KEARSIPAN PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN BARU.

KESATU : Menetapkan Pejabat pada Perangkat Daerah lama sebagai penanggungjawab perencanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan dokumen kearsipan pada masa transisi kelembagaan baru.

KEDUA : Pejabat pada Perangkat Daerah lama dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan penyelesaian penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- b. melaksanakan penyelesaian penyusunan dan penyampaian dokumen pelaporan Tahun 2020, terdiri atas:
 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Laporan Keuangan;
 3. Laporan Barang Milik Daerah;
 4. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 5. Evaluasi Hasil Rencana Kerja dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- c. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, terdiri atas:
 - 1. pengamanan barang milik daerah yang tercatat pada masing-masing Perangkat Daerah lama; dan
 - 2. inventarisasi barang milik daerah dan dokumen kelengkapannya sebagai bahan persiapan serah terima dengan Perangkat Daerah baru.
- d. mengawal dan bertanggungjawab selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- e. membuat Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya Milik/Kekayaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan, terdiri atas:
 - 1. inventarisasi dokumen-dokumen arsip sebagai bahan persiapan untuk serah terima oleh Perangkat Daerah lama kepada Perangkat Daerah baru; dan
 - 2. penyerahan Cap/stempel lama oleh Perangkat Daerah lama kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan dan penyampaian dokumen pelaporan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tanggal 4 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2020



Tembusan:

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja



Yogyakarta, 18 Desember 2020

Nomor : 130 / 676
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permohonan Data Kinerja 2020

Kepada
Yth. Seluruh Kepala OPD/Unit
Kerja

di

Yogyakarta

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 473 Tahun 2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Perencanaan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Dokumen Kearsipan pada masa transisi kelembagaan baru serta Permintaan Data Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dimohon mengisikan realisasi indikator sasaran dan program Tahun 2020 pada link sebagaimana terlampir paling lambat tanggal 23 Desember 2020. Data tersebut diharapkan dapat diisikan pula pada menu E-SAKIP JSS (E-LKIP, SIM Monev dan SIM Pelaporan) yang selanjutnya menjadi dasar penilaian kinerja organisasi serta bahan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022.
2. Data realisasi indikator sasaran dan program menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP OPD) Tahun 2020 yang harus disampaikan kepada Inspektorat dan Bagian Organisasi maksimal tanggal 4 Januari 2021. Adapun *template* laporan sama seperti LAKIP OPD Tahun 2019 dengan menyajikan realisasi kinerja sesuai dengan target yang diperjanjikan beserta factor pendorong dan penghambat dalam upaya pencapaiannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPALA

[Handwritten Signature]
AGUS TRIHARYONO .S.T., M.T.
NIP. 197203061996031004

Tembusan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 520332

EMAIL: adindalbang@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 130/443

Yogyakarta, 30 - 12 - 2020

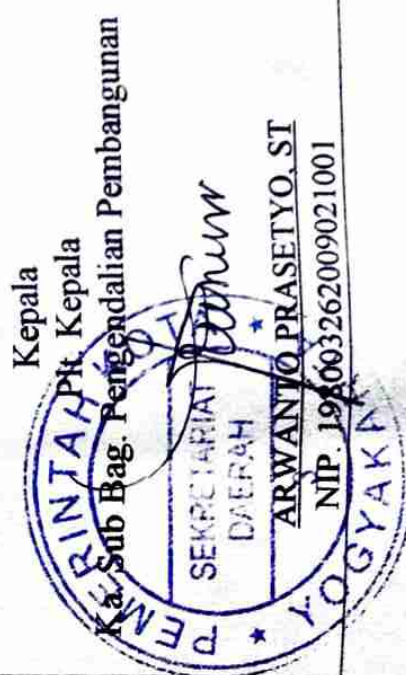
KEPADA Yth:

- 1. Inspektur Kota Yogyakarta
- 2. Ka. Bag. Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Di
YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
LKIP Setda tahun 2020	1 buku	Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



Diterima tanggal : *Arwanto Prasetyo*

Nomor : 138/443

Yogyakarta, 30 - 12 - 2020


KEPADA Yth:

- 1. Inspektur Kota Yogyakarta
- 2. Ka. Bag. Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR

YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
LKIP Setda tahun 2020	1 buku	Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya Kepala Plt. Kepala Ka. Sub Bag. Pengendalian Pembangunan 

Diterima tanggal : 04/12/2020


Ruska